



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum, motivasi dan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta sebagai pemacu produktifitas perlu memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Asisten Sekretaris Daerah

Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan pada Kecamatan, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan, Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja kepada Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek **Nomor 68**);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
7. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
8. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
10. Disiplin kerja adalah sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan.
11. Keterlambatan yang selanjutnya disingkat TL adalah pegawai negeri sipil yang terlambat masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja pada bulan berjalan.
12. Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disingkat PSW adalah pegawai negeri sipil yang meninggalkan kantor/pulang sebelum jam kerja dan jam pulang kerja yang ditentukan.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
14. Tidak Masuk adalah pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa mengajukan **cuti**.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemberian TPP;
- b. penghitungan TPP;
- c. pemotongan;
- d. prosedur dan tata cara pembayaran; dan
- e. pembiayaan;

**BAB IV**  
**PEMBERIAN TPP**

**Pasal 4**

- (1) TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan dan disiplin kerja.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) TPP diberikan setiap bulan.
- (4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan skor kehadiran.
- (5) Skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja;



- c. cuti; dan
  - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (6) Skor kehadiran setiap bulan dicetak melalui Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.
- (7) Ketidakhadiran kerja karena dinas luar yang meliputi diklat, perjalanan dinas ke luar daerah, perjalanan dinas ke luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (8) Ketidakhadiran kerja karena Libur Nasional dan Cuti Bersama yang jatuh pada hari kerja dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (9) Ketidakhadiran kerja tanpa alasan yang sah dihitung sebagai hari tidak hadir masuk kerja.

## **Pasal 5**

TPP tidak diberikan kepada:

- a. CPNS guru, PNS guru dan pengawas sekolah;
- b. CPNS dan PNS Badan Layanan Umum Daerah;
- c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- d. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- e. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- f. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
- g. PNS yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- h. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- i. Sekretaris Desa yang PNS;
- j. Kepala Desa yang PNS;

- k. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
- l. PNS tidak masuk kerja paling sedikit selama 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

### **Pasal 6**

Terhadap PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj) maka PNS yang bersangkutan diberikan TPP yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

### **Pasal 7**

PNS yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj). yang berasal dari Instansi di luar Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kelas jabatannya apabila dari instansi asal tidak mendapatkan TPP.

### **Pasal 8**

- (1) PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, maka pemberian TPP diberikan sejak melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) TPP diberikan kepada CPNS terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

## **BAB V**

### **PENGHITUNGAN TPP**

#### **Pasal 9**

- (1) TPP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPP = (\text{Harga Jabatan} \times \text{Satuan Harga *Jabatan*})$$

- (2) Satuan harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diklasifikasikan berdasarkan kategori Perangkat Daerah yang terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah kategori 1 (satu);
  - b. Perangkat Daerah kategori 2 (dua); dan
  - c. Perangkat Daerah kategori 3 (tiga).
- (3) Daftar Harga jabatan dan satuan harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (4) Penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dikurangi ketidakhadiran.
- (5) Jenis ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. TL;
  - b. PSW;
  - c. Cuti; dan
  - d. TM.
- (6) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan rumus:  
***Ketidakhadiran (%) = Prosentase Jenis Ketidakhadiran (%) x Jumlah Hari Ketidakhadiran.***
- (7) Untuk TL dan PSW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diakumulasikan menjadi 1 (satu) apabila dalam 1 (satu) hari PNS melakukan TL dan PSW.
- (4) Prosentase untuk jenis ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

Tabel prosentase TL dan PSW

NO	KATEGORI	AKUMULASI TL DAN PSW PER HARI	PEMOTONGAN PER HARI
1.	TL 1 dan/atau PSW 1	1 menit sampai dengan 15 menit	0,25 %
2.	TL 2 dan/atau PSW 2	16 menit sampai dengan 30 menit	0,50 %
3.	TL 3 dan/atau PSW 3	31 menit sampai dengan 60 menit	1,00 %
4.	TL 4 dan/atau PSW 4	61 menit sampai dengan 90 menit	1,50 %
5.	TL 5 dan/atau PSW 5	lebih dari 90 menit atau hanya melakukan finger 1 (satu) kali	2,00 %

Tabel prosentase Cuti

NO	KATEGORI	KETERANGAN/ INTERVAL	PEMOTONGAN PER HARI
1.	CT (Cuti Tahunan)	Menjalani cuti tahunan	2,50 %
2.	CAP (Cuti Karena Alasan Penting)	Menjalani cuti karena alasan penting	1,00 %
3.	CS (Cuti Sakit)	Menjalani cuti sakit	1,00 %
4.	CB (Cuti Bersalin)	Menjalani cuti bersalin	0,00 %

Tabel Prosentase TM

NO	KATEGORI	PEMOTONGAN PER HARI
1.	TM	4 %

(8) Bagi PNS yang TL/PSW/TM karena melaksanakan tugas diluar unit kerja/Perangkat Daerahnya tidak dikenakan pemotongan dengan dibuktikan Surat Perintah/Disposisi dari atasan.

(9) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).

## **Pasal 10**

Perhitungan TPP dilakukan secara manual berdasarkan kelas jabatan dan data kehadiran dalam Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (ASIK) Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (4) TPP dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2019.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
  - b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
  - c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Pengenaan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan ketentuan **perpajakan**.

### **Pasal 13**

Pengajuan SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:

- a. keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
- b. daftar perhitungan ketidakhadiran;
- c. daftar perhitungan penerimaan TPP;
- d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. ID Billing PPh Pasal 21.

### **Pasal 14**

SPM-LS TPP diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:

- a. keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
- b. daftar perhitungan ketidakhadiran;
- c. daftar perhitungan penerimaan TPP;
- d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. ID Billing PPh Pasal 21.

### **Pasal 15**

Format daftar perhitungan ketidakhadiran pegawai, daftar perhitungan penerimaan TPP, dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan **Bupati ini**.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 16**

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 17**

Besaran TPP yang diterima oleh PNS dengan kelas jabatan 1 (satu) sampai dengan kelas jabatan 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. pada Perangkat Daerah kategori 1 (satu) diberikan TPP sebesar Rp.450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. pada Perangkat Daerah kategori 2 (dua) diberikan TPP sebesar Rp.400.000,00- (empat ratus ribu rupiah); dan
- c. pada Perangkat Daerah kategori 3 (tiga) diberikan TPP sebesar Rp.350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
  - a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Asisten Sekretaris Daerah **Kabupaten**

Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 32);

- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 5);
- c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 6);
- d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 82).
- e. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja kepada Penguji Kendaraan Bermotor pada



Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 36) .

- f. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 42)
- g. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 16) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Desember 2018  
**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO DARDAK**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal

**Pj.SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**PARIYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 62**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si  
NIP .19650919199602 2 001

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 61 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TRENGGALEK.**

**DAFTAR HARGA JABATAN DAN SATUAN HARGA JABATAN**

NO	KATEGORI OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	SATUAN HARGA JABATAN
I	KATEGORI I				
	1. SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	15	3.555	1.025
		STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	2.715	1.025
		STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	13	2.715	1.025
		STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	2.715	1.025
		ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	3.030	1.025
		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	12	2.315	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH	8	1.295	1.025
		PENGOLAH DATA	6	690	1.025
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJASAMA	8	1.295	1.025
		PENGOLAH DATA	6	690	1.025
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9	1.430	1.025
		PENGOLAH DATA	6	690	1.025
		ANALIS BATAS WILAYAH	7	890	1.025
		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	2.315	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN	8	1.295	1.025
		PENGOLAH DATA	6	690	1.025

PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	8	1.295	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
KEPALA BAGIAN HUKUM	12	2.315	1.025
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM	8	1.295	1.025
PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	1.430	1.025
ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	890	1.025
PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	6	690	1.025
ANALIS HUKUM	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM	9	1.430	1.025
ANALIS HUKUM	7	890	1.025
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	3.030	1.025
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	12	2.315	1.025
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI & PENGEMBANGAN PROGRAM PEREKONOMIAN	8	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025

PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN	8	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
ANALIS KEUANGAN	7	890	1.025
KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	8	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	12	2.315	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	1.295	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGELOLA DATA	6	690	1.025
KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	6	690	1.025
PRANATA BARANG DAN JASA	6	690	1.025
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	1.025
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	2.315	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	9	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
ANALIS KINERJA	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	9	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025

ANALIS KELEMBAGAAN	7	890	1.025
ANALIS JABATAN	7	890	1.025
KEPALA SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	9	1.295	1.025
ANALIS PELAYANAN	7	890	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	3.030	1.025
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN	12	2.315	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	9	1.430	1.025
BENDAHARA	7	890	1.025
VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	12	2.315	1.025
KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PRAMU BAKTI	1	190	1.025
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.025
SEKRETARIS	6	690	1.025
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	8	1.295	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
PENGEMUDI	3	340	1.025
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.025
PRAMU BAKTI	1	190	1.025
KEPALA SUB BAGIAN TU PIMPINAN	8	1.295	1.025

	SEKRETARIS	6	690	1.025
	PENGOLAH DATA	6	690	1.025
	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA	12	2.315	1.025
	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	8	1.295	1.025
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
	PETUGAS PROTOKOL	5	490	1.025
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
	AJUDAN	6	690	1.025
	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS	8	1.295	1.025
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
	PENGOLAH DATA	6	690	1.025
	PENYUSUN BAHAN INFORMASI	7	890	1.025
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
	ANALIS HUMAS DAN PROTOKOL	7	890	1.025
	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	8	1.295	1.025
	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	5	490	1.025
	PENGOLAH DATA	6	690	1.025
	PRANATA TAMAN	6	690	1.025
	PRAMU BAKTI	1	190	1.025
	PRANATA JAMUAN	6	690	1.025
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
	PENGEMUDI	3	340	1.025
	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	5	490	1.025
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	4	489	1.025
<b>2. INSPEKTORAT</b>	INSPEKTUR	14	3030	1.025
	SEKRETARIS	12	2140	1.025
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1295	1.025
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
	PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.025
	PENGEMUDI	3	340	1.025
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.025
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.025
	PENGOLAH DATA	6	690	1.025
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1295	1.025

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
		PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6	690	1.025
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
		PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	690	1.025
		PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	890	1.025
		PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	890	1.025
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	690	1.025
		BENDAHARA	7	890	1.025
		PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	6	690	1.025
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	1990	1.025
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	1990	1.025
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	1990	1.025
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (MADYA)	11	1930	1.025
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (MUDA)	9	1355	1.025
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (PERTAMA)	8	1280	1.025
		AUDITOR AHLI (MADYA)	11	1930	1.025
		AUDITOR AHLI (MUDA)	9	1355	1.025
		AUDITOR AHLI (PERTAMA)	8	1280	1.025
		AUDITOR TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	1.025
		PENGAWAS PEMERINTAHAN AHLI (MADYA)	11	1930	1.025
3.	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	3030	1.025
		SEKRETARIS	12	2140	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1295	1.025
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.025
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.025
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.025
		PENGOLAH DATA	6	690	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1430	1.025

BENDAHARA	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
ANALIS KEUANGAN	7	890	1.025
VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	1.025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1430	1.025
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	1.025
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.025
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA	11	2045	1.025
KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR	9	1430	1.025
ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN	7	890	1.025
ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	890	1.025
PENGELOLA TEKNIS SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN	6	690	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
KEPALA SUB BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN PERUMAHAN	9	1430	1.025
ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	1.025
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	890	1.025
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	1430	1.025
PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	890	1.025
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	11	2045	1.025



KEPALA SUB BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8	1295	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.025
KEPALA SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	9	1430	1.025
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
KEPALA SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL	8	1295	1.025
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	11	2045	1.025
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1295	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
ANALIS SOSIAL BUDAYA	7	890	1.025
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.025
KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1430	1.025
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.025
ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9	1430	1.025
ANALIS PARIWISATA	7	890	1.025
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN INOVASI DAERAH	11	2045	1.025

		KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	9	1430	1.025
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.025
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
		KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	8	1295	1.025
		ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	7	890	1.025
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
		ANALIS PEMBANGUNAN	7	890	1.025
		KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	1430	1.025
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.025
		PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	6	690	1.025
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
4.	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	14	3030	1.025
		SEKRETARIS	12	2140	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1295	1.025
		PENGOLAH DATA	6	690	1.025
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.025
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1295	1.025
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.025
		PENGEMUDI	3	340	1.025
		PENGOLAH DATA	6	690	1.025
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.025
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1430	1.025

BENDAHARA	7	890	1.025
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.025
VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	1.025
PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	6	690	1.025
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	11	2045	1.025
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PENDAPATAN	8	1295	1.025
PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	890	1.025
PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BELANJA	8	1295	1.025
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	890	1.025
PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	690	1.025
PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD	8	1295	1.025
PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	890	1.025
PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD	6	690	1.025
KEPALA BIDANG ASET	11	2045	1.025
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN ASET	8	1295	1.025
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	7	890	1.025
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	6	690	1.025
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.025
PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN AKUISISI ASET	8	1295	1.025
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.025

PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	7	890	1.025
PENGELOLA AKUISISI	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET	8	1295	1.025
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.025
PENGELOLA DATA REKONSILIASI	6	690	1.025
PENGOLAH DATA	6	690	1.025
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN PAJAK	11	2045	1.025
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN	8	1295	1.025
PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	6	690	1.025
PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	6	690	1.025
PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN	8	1295	1.025
PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN	9	1430	1.025
BENDAHARA	7	890	1.025
PENGELOLA WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	6	690	1.025
PENGELOLA PELAPORAN DATA PENERIMAAN	6	690	1.025
KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	2045	1.025
KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI EVALUASI ANGGARAN	8	1295	1.025
VERIFIKATOR ANGGARAN	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	8	1295	1.025
PENGOLAH DATA PENGANGGARAN	6	690	1.025
PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	6	690	1.025
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	8	1295	1.025

		PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	6	690	1.025
		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	11	2045	1.025
		KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	8	1295	1.025
		PENATA KEUANGAN	7	890	1.025
		PENGELOLA GAJI	6	690	1.025
		PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR	6	690	1.025
		KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	8	1295	1.025
		PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH	6	690	1.025
		PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	890	1.025
		KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG	8	1295	1.025
		VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	1.025
		PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA	6	690	1.025
		KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	11	2045	1.025
		KEPALA SUB BIDANG INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI	8	1295	1.025
		PENGOLAH DATA PENDATAAN, PEMETAAN, DAN PENILAIAN	6	690	1.025
		PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN	6	690	1.025
		PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK	6	690	1.025
		KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN	8	1295	1.025
		PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	6	690	1.025
		KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	8	1295	1.025
		PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	6	690	1.025
		ANALIS KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7	890	1.025
II.	1.	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
		SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14	2.865	975
		KEPALA BAGIAN UMUM	11	2.090	975

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
PRANATA KEARSIPAN	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	8	1.295	975
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
PRAMU BAKTI	1	190	975
PENGEMUDI	3	340	975
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	11	2.090	975
KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI RAPAT DAN PROTOKOL	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
ANALIS PRODUK HUKUM	7	890	975
KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	2.090	975
KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	975
BENDAHARA	7	890	975
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	8	1.295	975
VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	975
KEPALA BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS	11	2.090	975
KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS	8	1.295	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
ANALIS PRODUK HUKUM	7	890	975

		KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI, INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT	8	1.295	975
		PENGELOLA DATA	6	690	975
		PENYUSUN BAHAN INFORMASI	7	890	975
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM	8	1.295	975
		PENGELOLA DATA	6	690	975
		ANALIS PRODUK HUKUM	7	890	975
2.	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	14	2.865	975
		SEKRETARIS	12	2.115	975
		PENILIK AHLI (MADYA)	11	1.930	975
		PENILIK AHLI (MUDA)	9	1.355	975
		PAMONG BELAJAR AHLI (MADYA)	11	1.930	975
		PAMONG BELAJAR AHLI (MUDA)	9	1.355	975
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM	9	1.430	975
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	975
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	975
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
		BENDAHARA	7	890	975
		VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	975
		PENGELOLA GAJI	6	690	975
		PENGOLAH DAFTAR GAJI	6	690	975
		ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7	890	975
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	975
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
		PRANATA BARANG DAN JASA	6	690	975
		PRAMU BAKTI	1	190	975
		PENGEMUDI	3	340	975

PENGELOLA KENDARAAN	6	690	975
SEKOLAH DASAR			
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	975
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
PETUGAS KEAMANAN	3	340	975
PRAMU BAKTI	1	190	975
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	2.045	975
KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIK	8	1.295	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
ANALIS PENDIDIKAN	7	890	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN	8	1.295	975
ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN	7	890	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
ANALIS TATA USAHA	7	890	975
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	975
PENGADMINISTRASI KESISWAAN	5	490	975
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	490	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	690	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PETUGAS KEAMANAN	3	340	975
PRAMU BAKTI	1	190	975
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975



KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	11	2.045	975
KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH DASAR	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH DASAR	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	11	2.045	975
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	11	2.045	975
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
ANALIS KEOLAHRAGAAN	7	890	975
KEPALA SEKSI PEMUDA DAN PRAMUKA	8	1.295	975

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		KEPALA SEKSI OLAH RAGA	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KELUARGA	8	1.295	975
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	690	975
		PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	690	975
		KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT, KURSUS DAN KESETARAAN	8	1.295	975
		PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	6	690	975
		ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	7	890	975
		ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN	7	890	975
		KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	8	1.295	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
3.	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	2.865	975
		SEKRETARIS	11	2.045	975
		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	9	1.430	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	975
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET	9	1.430	975
		BENDAHARA	7	890	975

PENGELOLA GAJI	6	690	975
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
ANALIS KEUANGAN	7	890	975
VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	975
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	8	1.295	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	975
PENGEMUDI	3	340	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	690	975
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	2.045	975
KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	9	1.430	975
PENGELOLA PROGRAM GIZI	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
ANALIS GIZI	7	890	975
ANALIS KESEHATAN	7	890	975
ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	7	890	975
KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1.430	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	690	975
ANALIS KESEHATAN	7	890	975
KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAH RAGA	9	1.430	975
PEMERIKSA SANITASI	7	890	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11	2.045	975

KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	9	1.430	975
PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	6	690	975
ANALIS KESEHATAN	7	890	975
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	8	1.295	975
PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PRAMU LABORATORIUM	1	190	975
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	8	1.295	975
PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	6	690	975
ANALIS KESEHATAN	7	890	975
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	11	2.045	975
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9	1.430	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI PELATIHAN	5	490	975
ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	7	890	975
PENGELOLA LABORATORIUM	6	690	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN	8	1.295	975
PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	6	690	975
INSPEKTUR SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	7	890	975
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN	9	1.430	975
PENGELOLA KEFARMASIAN	6	690	975
ANALIS OBAT DAN MAKANAN	7	890	975
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	11	2.045	975
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	8	1.295	975

PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	6	690	975
PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	6	690	975
PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	6	690	975
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	8	1.295	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	6	690	975
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	8	1.295	975
PENGELOLA DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	2.045	975
KEPALA SEKSI KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	8	1.295	975
PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	6	690	975
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	9	1.430	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	9	1.430	975
PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	9	1.430	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PENGELOLA LABORATORIUM	6	690	975
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA (PEMULA)	5	490	975

		KEPALA UPT INSTALASI FARMASI	9	1.430	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	975
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
		PENGEMUDI	3	340	975
		ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PELAKSANA (PEMULA)	5	490	975
		APOTEKER AHLI (PERTAMA)	8	1.280	975
4.	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	2.865	975
		SEKRETARIS	12	2.115	975
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1.430	975
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		PRAMU BAKTI	1	190	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	975
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	975
		PENGELOLA DATA	6	690	975
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	975
		BENDAHARA	7	890	975
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
		KEPALA BIDANG FORMASI DAN INFORMASI	11	2.045	975
		KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN	9	1.430	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		ANALIS SUMBER DAYA APARATUR	7	890	975
		KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN DATA	9	1.430	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	690	975
		PENGELOLA SITUS/WEB	6	690	975
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	975
		ANALIS SISTEM	7	890	975

INFORMASI			
KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN PENGHARGAAN	9	1.430	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
ANALIS KINERJA	7	890	975
KEPALA BIDANG MUTASI	11	2.045	975
KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PEMINDAHAN	9	1.430	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
ANALIS JABATAN	7	890	975
KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	1.430	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
ANALIS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR	7	890	975
KEPALA SUB BIDANG JABATAN	9	1.430	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
ANALIS JABATAN	7	890	975
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	11	2.045	975
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	1.430	975
ANALIS DIKLAT	7	890	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
PRANATA DIKLAT	6	690	975
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER	9	1.430	975
ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	7	890	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN	9	1.430	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	7	890	975
ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	975
ASSESOR SDM APARATUR AHLI (UTAMA)	13	2.455	975
ASSESOR SDM APARATUR AHLI (MADYA)	11	1.930	975
ASSESOR SDM APARATUR AHLI (MUDA)	9	1.355	975

		ASSESOR SDM APARATUR AHLI (PERTAMA)	8	1.280	975
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	14	2.865	975
		SEKRETARIS	12	2.115	975
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	975
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	975
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	975
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	975
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	975
		PENGELOLA DATA	6	690	975
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	975
		BENDAHARA	7	890	975
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	690	975
		KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	3	340	975
		PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	6	690	975
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK	8	1.295	975



		PENGOLAH DATA	6	690	975
		KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENINDAKAN	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI KERJASAMA	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	975
		KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	8	1.295	975
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL PELAKSANA (PEMULA)	5	490	975
6.	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	2.865	975
		SEKRETARIS	11	2.045	975
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	975
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	975
		BENDAHARA	7	890	975
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	975
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	975

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11	2.045	975
KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8	1.295	975
PENGELOLA DATABASE	6	690	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	2.045	975
KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	490	975
PRANATA KEARSIPAN	6	690	975
KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	8	1.295	975
PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6	690	975
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	2.045	975
KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEWARGANEGARAAN	8	1.295	975
PENGELOLA KEUANGAN	6	690	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	2.045	975
KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	8	1.295	975
PENGOLAH DATA	6	690	975
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	8	1.295	975
PRANATA KEARSIPAN	6	690	975

		PENGELOLA DATA	6	690	975
		KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN MUNJUNGAN	9	1.430	975
		KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PANGGUL	9	1.430	975
		KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WATULIMO	9	1.430	975
7.	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	2.865	975
		SEKRETARIS	11	2.045	975
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	975
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	975
		PENGOLAH DATA	6	690	975
		PENGEMUDI	3	340	975
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	975
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	975
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	975
		BENDAHARA	7	890	975
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	975
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	975
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	975
		KEPALA BIDANG STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PUBLIKASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	1.295	975
		PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN	7	890	975
		KEPALA SEKSI STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	1.295	975

		PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	7	890	975
		KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	9	1.430	975
		ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	975
		KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	8	1.295	975
		PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI	6	690	975
		KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENANAMAN MODAL	8	1.295	975
		PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN	5	490	975
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	8	1.295	975
		PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR	6	690	975
		KEPALA BIDANG PERIZINAN	11	2.045	975
		KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN USAHA	8	1.295	975
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	975
		KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	9	1.430	975
		ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	7	890	975
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	975
		KEPALA SEKSI VERIFIKASI ADMINISTRASI PERIZINAN	8	1.295	975
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	975
		PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	6	690	975
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	975
<b>III</b>	<b>KATEGORI III</b>				
	<b>1. DINAS PERIKANAN</b>	KEPALA DINAS PERIKANAN	14	2865	950
		SEKRETARIS	11	2045	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1295	950

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
PENGEMUDI	3	340	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1430	950
PENGELOLA DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
BENDAHARA	7	890	950
PENGADMINISTRASI ANGGARAN	5	490	950
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN	11	2045	950
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PEMASARAN	9	1430	950
ANALIS PASAR	7	890	950
PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	9	1430	950
PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN	6	690	950
ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	7	890	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU SECARA LABORATORIS TERHADAP PRODUK HASIL PERIKANAN	6	690	950
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	11	2045	950
KEPALA SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	8	1295	950
PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	6	690	950
PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA	7	890	950

ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	7	890	950
ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	7	890	950
ANALIS STANDARDISASI BUDIDAYA	7	890	950
KEPALA SEKSI PERBENIHAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	9	1430	950
PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	6	690	950
PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	890	950
ANALIS POTENSI PERBENIHAN	7	890	950
ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	890	950
ANALIS BENIH	7	890	950
KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	11	2045	950
KEPALA SEKSI EKSPLOITASI DAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN	9	1430	950
PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	6	690	950
ANALIS PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN	7	890	950
ANALIS KENELAYANAN	7	890	950
ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN	7	890	950
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	7	890	950
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN	8	1295	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	6	690	950
PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	890	950
PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN JENIS IKAN	7	890	950
ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR	7	890	950
KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	9	1430	950

		TEKNISI KONSERVASI	5	490	950
		PENGELOLA JASA PANGKALAN Pendaratan Ikan	6	690	950
		PENGELOLA PENGAWASAN Penangkapan Ikan	6	690	950
2.	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14	2865	950
		SEKRETARIS	11	2045	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1430	950
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		PRAMU BAKTI	1	190	950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KARCIS	5	490	950
		KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA	11	2045	950
		KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA ALAM	8	1295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TATA KELOLA DESTINASI	8	1295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA BUDAYA DAN BUATAN	8	1295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KOORDINATOR	7	890	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	340	950
		PRAMU KEBERSIHAN	1	190	950

PRAMU BAKTI	1	190	950
PEMANDU WISATA	5	490	950
KEPALA BIDANG PEMASARAN	11	2045	950
KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR	8	1295	950
PENGELOLA PEMASARAN	6	690	950
KEPALA SEKSI SARANA PROMOSI DAN INFORMASI PARIWISATA	8	1295	950
PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	6	690	950
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA	8	1295	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA	11	2045	950
KEPALA SEKSI USAHA SARANA PARIWISATA	8	1295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI USAHA JASA PARIWISATA	8	1295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN	8	1295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	11	2045	950
KEPALA SEKSI PELESTARIAN TRADISI, SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA	8	1295	950
PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	7	890	950
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN SENI BUDAYA	8	1295	950
PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	5	490	950
KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	8	1295	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA UPT DESTINASI WISATA TERPADU	9	1430	950
PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	340	950
PEMANDU WISATA	5	490	950



		KOORDINATOR	7	890	950
		PRAMU KEBERSIHAN	1	190	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH MAKANAN	6	690	950
		PRANATA JAMUAN	6	690	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
3.	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PRAMU BAKTI	1	190	950
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, DAN PELAPORAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	950
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		ANALIS JALAN JEMBATAN	7	890	950
		ANALIS TEKNIK DAN MATERI	7	890	950
		PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	7	890	950
		KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN AIR	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	6	690	950
		PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN	6	690	950

KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	8	1.295	950
PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	7	890	950
KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	690	950
PENILIK JALAN	6	690	950
ANALIS JALAN JEMBATAN	7	890	950
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	9	1.430	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS JALAN JEMBATAN	7	890	950
PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	7	890	950
KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PEMELIHARA JALAN	3	340	950
PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	690	950
PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
OPERATOR ALAT BERAT	5	490	950
PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	7	890	950
PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN	6	690	950
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI	11	2.045	950
KEPALA SEKSI KONSERVASI SDA DAN PENGEMBANGAN IRIGASI	9	1.430	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	950
ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	890	950

PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	950
PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	6	690	950
KEPALA SEKSI BINA MANFAAT DAN JASA KONSTRUKSI	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	6	690	950
PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	6	690	950
ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	950
PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	950
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI	8	1.295	950
PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	6	690	950
PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN	6	690	950
PENJAGA PINTU AIR	2	290	950
KEPALA BIDANG PERTANAHAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	7	890	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA SEKSI INVENTARISASI, PENGUASAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH	7	890	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA SEKSI PERMASALAHAN PERTANAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	9	1.430	950
ANALIS KONFLIK PERTANAHAN	7	890	950

		PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	6	690	950
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG	8	1.295	950
		PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	7	890	950
		ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	890	950
		PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON	7	890	950
		KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	8	1.295	950
		PENGELOLA TATA RUANG	6	690	950
		ANALIS TATA RUANG	7	890	950
		PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	890	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN	8	1.295	950
		PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	6	690	950
		PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN	6	690	950
		ANALIS TATA RUANG	7	890	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI	9	1.430	950
		PENGUJI BAHAN LABORATORIUM	7	890	950
		PENGELOLA DATA BAHAN DAN KONTROKSI	6	690	950
		PENGUJI BAHAN DAN KONTRUKSI	7	890	950
4.	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN &amp; LINGKUNGAN HIDUP</b>	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	950
ANALIS PERENCANAAN	7	890	950
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGEMUDI	3	340	950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
PRAMU BAKTI	1	190	950
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	950
BENDAHARA	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH	8	1.295	950
JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN	5	490	950
ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	7	890	950
KEPALA SEKSI PERMUKIMAN	8	1.295	950
PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN	7	890	950
PENGELOLA DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI PERUMAHAN	8	1.295	950
PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN	7	890	950
ANALIS PERUMAHAN	7	890	950
KEPALA BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN	9	1.430	950
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	950
TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	490	950

KEPALA SEKSI AIR LIMBAH DOMESTIK DAN DRAINASE	9	1.430	950
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	950
TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	490	950
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN SANITASI PENYEDIAAN AIR MINUM	8	1.295	950
PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	3	340	950
TEKNISI AIR	5	490	950
TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	490	950
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	8	1.295	950
PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN	7	890	950
PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	690	950
PENGAWAS KESELATANAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	7	890	950
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	8	1.295	950
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	7	890	950
PENGELOLA LINGKUNGAN	6	690	950
PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	690	950
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAJIAN LINGKUNGAN	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	950
ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	7	890	950
PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	6	690	950
PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	690	950

		KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	8	1.295	950
		PENGELOLA KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	6	690	950
		PRAMU KEBERSIHAN	1	190	950
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABA N KEGIATAN	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	8	1.295	950
		PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN	6	690	950
		PRANATA TAMAN	6	690	950
		PRAMU TAMAN	1	190	950
		SANITARIAN PERTAMA	8	1.280	950
		KEPALA UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH	9	1.430	950
		PENGELOLA SAMPAH	6	690	950
		PENGELOLA LIMBAH	6	690	950
5.	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	950
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		PRAMU BAKTI	1	190	950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	8	1.295	950
PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING	6	690	950
PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	6	690	950
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL	8	1.295	950
PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL	6	690	950
PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	5	490	950
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	5	490	950
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	6	690	950
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	8	1.295	950
ANALIS PELAYANAN SOSIAL	7	890	950
PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	6	690	950
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9	1.430	950
ANALIS MASALAH SOSIAL	7	890	950
PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	6	690	950
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENGUATAN KELUARGA	8	1.295	950
PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	7	890	950



		PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	6	690	950
		KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	9	1.430	950
		PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	7	890	950
		ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	7	890	950
		KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK	9	1.430	950
		ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	7	890	950
		PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	6	690	950
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	8	1.295	950
		PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL	6	690	950
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT	8	1.295	950
		ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	7	890	950
		PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	6	690	950
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL	8	1.295	950
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	690	950
6.	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI	5	490	950

KEUANGAN			
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG	6	690	950
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	11	2.045	950
KEPALA SEKSI SYARAT KERJA	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN JAMSOSTEK	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI INDUSTRI NON AGRO	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN DESAIN PRODUK INDUSTRI	9	1.430	950
ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA SEKSI INDUSTRI AGRO	9	1.430	950
ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGRO INDUSTRI	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950

		KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		KEPALA SEKSI TRANSMIGRASI	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI (PERTAMA)	8	1.280	950
		PENGANTAR KERJA AHLI (MUDA)	9	1.355	950
		PENGANTAR KERJA AHLI (PERTAMA)	8	1.280	950
		INSTRUKTUR AHLI (MADYA)	11	1.930	950
		INSTRUKTUR AHLI (MUDA)	9	1.355	950
		INSTRUKTUR AHLI (PERTAMA)	8	1.280	950
		PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI (MUDA)	9	1.355	950
		PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	950
7.	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	9	1.430	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
		KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN	7	890	950
		ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA	7	890	950

PENGELOLA INSTALASI KEBUN/ LAHAN PRAKTEK DAN SCREEN HOUSE	6	690	950
PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN	6	690	950
PENGELOLA KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	690	950
PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	6	690	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	690	950
PENGELOLA PETERNAKAN	6	690	950
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	9	1.430	950
BENDAHARA	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
PRAMU BAKTI	1	190	950
PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN DAN PELAYANAN MEDIKVETERINER	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	6	690	950
PELATIH / PAWANG HEWAN	5	490	950
KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950

PENGAWAS HYGIENE, SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7	890	950
PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	7	890	950
PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6	690	950
KEPALA SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	7	890	950
PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT IKAN	7	890	950
PENGELOLA LABORATORIUM	6	690	950
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	9	1.430	950
ANALIS PANGAN	7	890	950
PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	6	690	950
KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	9	1.430	950
ANALIS PANGAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	6	690	950
KEPALA SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	9	1.430	950
ANALIS PANGAN	7	890	950
PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	6	690	950
PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN	6	690	950
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	2.045	950
KEPALA SEKSI TANAMAN PANGAN	9	1.430	950
PENGOLAH DATA	6	690	950

PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
ANALIS POTENSI BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI	7	890	950
ANALIS POTENSI BUDIDAYA SEREALIA	7	890	950
PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	6	690	950
ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	7	890	950
KEPALA SEKSI TANAMAN HORTIKULTURA	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6	690	950
PENGELOLA DAN KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	690	950
KEPALA SEKSI BINA USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	1.430	950
ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN	7	890	950
KEPALA BIDANG BINA PRODUKSI DAN BINA USAHA PETERNAKAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK	8	1.295	950
PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	7	890	950
PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	6	690	950
PENGELOLA INSTALASI TERNAK	6	690	950
PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK GADUHAN DAN SEMI GADUHAN	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI PAKAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	9	1.430	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS PAKAN TERNAK	7	890	950
PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	7	890	950

KEPALA SEKSI BINA USAHA PETERNAKAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK/ PENGURUS IZIN BUDI DAYA TERNAK	6	690	950
PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	6	690	950
PENYUSUN RENCANA MANAJEMEN MUTU PASCA PANEN	7	890	950
KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM	9	1.430	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	890	950
PENGELOLA PASCA PANEN	6	690	950
PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA	7	890	950
KEPALA SEKSI TANAMAN TAHUNAN	9	1.430	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	890	950
PENGELOLA PEKARYA KEBUN	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGELOLA PASCA PANEN	6	690	950
PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA	7	890	950
KEPALA SEKSI BINA USAHA PERKEBUNAN	9	1.430	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	6	690	950
PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	690	950
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	890	950

ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN	7	890	950
KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENYULUHAN	9	1.430	950
ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	7	890	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	6	690	950
PENGELOLA ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENYULUH PERTANIAN	6	690	950
KEPALA SEKSI SARANA	8	1.295	950
PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	7	890	950
ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	7	890	950
KEPALA SEKSI PRASARANA	9	1.430	950
ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	7	890	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA TATA GUNA LAHAN, AIR, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	6	690	950
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	950
PENYULUH PERTANIAN AHLI (MADYA)	11	1.930	950
PENYULUH PERTANIAN AHLI (MUDA)	9	1.355	950
PENYULUH PERTANIAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	950
PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	950
PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (PELAKSANA LANJUTAN)	7	955	950
PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA	5	490	950
KEPALA UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	9	1.430	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PERAWAT TERNAK	6	740	950



		PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	6	690	950
		PENGELOLA INSTALASI KEBUN/ LAHAN PRAKTEK DAN SCREEN HOUSE	6	690	950
		PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	6	690	950
		PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/ UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	950
		KEPALA UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	9	1.430	950
		KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN	7	890	950
		PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	6	690	950
		PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	6	690	950
		PENGELOLA PASCA PANEN	6	690	950
		ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	7	890	950
		PENGELOLA KEBUN KOPI PERKEBUNAN	6	690	950
		PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	6	690	950
		PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	690	950
		PENGELOLA TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	6	690	950
		KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	9	1.430	950
		PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	7	890	950
		PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6	690	950
8.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGEMUDI	3	340	950
PRAMU BAKTI	1	190	950
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
BENDAHARA	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
ANALIS PERENCANAAN PROGRAM	7	890	950
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	11	2.045	950
KEPALA SEKSI LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA	8	1.295	950
PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DESA	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	6	690	950
PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	6	690	950
KEPALA SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	8	1.295	950
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN	11	2.045	950

9.	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	PRANATA SUMBER DAYA IPTEK	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERDESAAN	8	1.295	950
		KEPALA SEKSI USAHA EKONOMI PERDESAAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	7	890	950
		KEPALA SEKSI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN	8	1.295	950
		ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	7	890	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN	6	690	950
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERDESAAN	8	1.295	950
		PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	6	690	950
		KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	950
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
BENDAHARA	7	890	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
KEPALA BIDANG LALU LINTAS	11	2.045	950
KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI LLAJ	5	490	950
ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	7	890	950
PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	6	690	950
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMATIKA LLAJ	9	1.430	950
ANALIS LALU LINTAS	7	890	950
PENGADMINISTRASI LLAJ	5	490	950
ANALIS ANGKUTAN DARAT	7	890	950
PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN	6	690	950
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM	8	1.295	950
PENGELOLA PENERANGAN JALAN	6	690	950
PENGELOLA PENERANGAN JALAN	6	690	950
TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	5	490	950
PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	3	340	950
KEPALA BIDANG ANGKUTAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN TERMINAL	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI KARCIS	5	490	950
PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	7	890	950
PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	6	690	950
PENGADMINISTRASI LLAJ	5	490	950
JURU PUNGUT	3	340	950

RETRIBUSI			
KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG, KHUSUS DAN LAUT	9	1.430	950
ANALIS PERIZINAN	7	890	950
PENGELOLA SARANA ANGKUTAN	6	690	950
ANALIS ANGKUTAN DARAT	7	890	950
ANALIS ANGKUTAN LAUT	7	890	950
PENGELOLA USAHA ANGKUTAN	6	690	950
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASI	11	2.045	950
KEPALA SEKSI KETERTIBAN DAN KESELAMATAN JALAN	8	1.295	950
PENGAWAS KESELAMATAN DARAT/ JALAN	7	890	950
PRANATA TILANG	6	690	950
PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	5	490	950
PENYUSUN PROGRAM KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN	7	890	950
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PERPARKIRAN	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI KARCIS	5	490	950
PENGELOLA PERPARKIRAN	6	690	950
JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	340	950
KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	8	1.295	950
PENGELOLA DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	5	490	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PENYUSUN RENCANA PENGUJIAN	7	890	950
PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	7	890	950
PENGADMINISTRASI CONTOH UJI	5	490	950
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR (PELAKSANA LANJUTAN)	7	955	950
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	950

10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL (PENYELIA)	8	1.230	950
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	2.865	950
SEKRETARIS	11	2.045	950
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
BENDAHARA	7	890	950
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
PRAMU KEBERSIHAN	1	190	950
PENGEMUDI	3	340	950
KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT DAN STATISTIK	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	8	1.295	950
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	690	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA DATABASE	6	690	950
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PERANCANG GRAFIS	7	890	950
OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	3	340	950
PENGELOLA SITUS/WEB	6	690	950
TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	5	490	950

KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	950
ANALIS INFORMASI	7	890	950
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
TENAGA PELIPUTAN	6	690	950
PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI	7	890	950
PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA	6	690	950
PENGELOLA SITUS/WEB	6	690	950
PENGELOLA TV DAN RADIO	6	690	950
OPERATOR RADIO	5	490	950
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	8	1.295	950
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	690	950
PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	7	890	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGELOLA SITUS/WEB	6	690	950
PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	690	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
OPERATOR TRANSMISI SANDI	5	490	950
ANALIS PERSANDIAN	7	890	950
OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	5	490	950
PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI	6	690	950
PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	690	950
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	11	2.045	950

		KEPALA SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	1.295	950
		PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	690	950
		PENGELOLA DATABASE	6	690	950
		PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	690	950
		TEKNISI JARINGAN INSTALASI	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	1.295	950
		PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	690	950
		PENGELOLA DATABASE	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	8	1.295	950
		OPERATOR TRANSMISI SANDI	5	490	950
		ANALIS PERSANDIAN	7	890	950
		OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	5	490	950
		PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
11.	<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN</b>	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PRAMU BAKTI	1	190	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	950



PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
BENDAHARA	7	890	950
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
KEPALA BIDANG USAHA MIKRO	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN PEMASARAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI KEWIRAUSAHAAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PERMODALAN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA BIDANG KOPERASI	11	2.045	950
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11	2.045	950
KEPALA SEKSI METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	8	1.295	950
PENGOLAH DATA	6	690	950
KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PROMOSI	8	1.295	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950

		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA UPT PASAR DAERAH	9	1.430	950
		PENAGIHH RETRIBUSI	5	490	950
12.	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	2.865	950
		SEKRETARIS	11	2.045	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		PRAMU BAKTI	1	190	950
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PRANATA BENCANA	6	690	950
		PENGOLAH BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	6	690	950

		PENYULUH BENCANA	7	890	950
		KEPALA SEKSI KEDARURATAN	9	1.430	950
		PRANATA BENCANA	6	690	950
		ANALIS MITIGASI BENCANA	7	890	950
		ANALIS BENCANA	7	890	950
		KEPALA BIDANG LOGISTIK REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	11	2.045	950
		KEPALA SEKSI LOGISTIK	8	1.295	950
		KOORDINATOR PERGUDANGAN	7	890	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	7	890	950
		KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
13.	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	14	2865	950
		SEKRETARIS	11	2045	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
		KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	11	2045	950
		KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	8	1295	950
		PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	490	950
		PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	690	950

		KEPALA SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	8	1295	950
		PENGAWAS PERPUSTAKAAN	7	890	950
		PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	6	690	950
		KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN	8	1295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA BIDANG KEARSIPAN	11	2045	950
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	8	1295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS	8	1295	950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
		PRANATA REPRODUKSI ARSIP	6	690	950
		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PEMASYARAKATAN ARSIP	8	1295	950
		PENYULUH KEARSIPAN	7	890	950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	950
		PUSTAKAWAN TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	950
14.	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	KEPALA KANTOR BANGSA DAN POLITIK	13	2.465	950
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	1.430	950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		ANALIS PENDAYAGUNAAN LEMBAGA KEAGAMAAN	7	890	950

		ANALIS PERMASALAHAN	7	890	950
		PENGOLAH DATA BERKAS SENGKETA	6	690	950
		PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	690	950
		ANALIS OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	7	890	950
		ANALIS FORUM KERUKUNAN UMAT	7	890	950
		ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	7	890	950
		ANALIS KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	7	890	950
		ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	7	890	950
		ANALIS DATA INTELIJEN	7	890	950
		ANALIS INTELIJEN	7	890	950
		KEPALA SEKSI BINA IDEOLOGI DAN POLITIK DALAM NEGERI	8	1.295	950
		ANALIS PARTAI POLITIK	7	890	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		ANALIS PEMILIHAN UMUM	7	890	950
15.	KECAMATAN TRENGGALEK	CAMAT TRENGGALEK	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950

		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
16.	KECAMATAN POGALAN	CAMAT POGALAN	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950		
17.	KECAMATAN DURENAN	CAMAT DURENAN	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950

		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
<b>18.</b>	<b>KECAMATAN WATULIMO</b>	CAMAT WATULIMO	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN	8	1.295	950

		KETERTIBAN UMUM			
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
<b>19. KECAMATAN MUNJUNGAN</b>		CAMAT MUNJUNGAN	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950



		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
<b>20. KECAMATAN KAMPAK</b>		CAMAT KAMPAK	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950	
	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950	
	PENGOLAH DATA	6	690	950	
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950	
<b>21. KECAMATAN GANDUSARI</b>		CAMAT GANDUSARI	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN	8	1.295	950

		UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
<b>22. KECAMATAN KARANGAN</b>		CAMAT KARANGAN	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
23.	KECAMATAN SURUH	CAMAT SURUH	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950		
24.	KECAMATAN DONGKO	CAMAT DONGKO	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950

		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
25.	<b>KECAMATAN PULE</b>	CAMAT PULE	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950

		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
26.	<b>KECAMATAN PANGGUL</b>	CAMAT PANGGUL	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		BENDAHARA	7	890	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950

		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
<b>27.</b>	<b>KECAMATAN TUGU</b>	CAMAT TUGU	12	2.315	950
		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
<b>28.</b>	<b>KECAMATAN BENDUNGAN</b>	CAMAT BENDUNGAN	12	2.315	950

		SEKRETARIS	11	2.090	950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	950
		BENDAHARA	7	890	950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGEMUDI	3	340	950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	950
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	950
		PENGOLAH DATA	6	690	950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	950
29.	<b>KELURAHAN TAMANAN</b>	LURAH TAMANAN	9	1.540	900
		SEKRETARIS	8	1.320	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	900
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	1.295	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900

30.	KELURAHAN SURODAKAN	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	1.295	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	1.295	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		LURAH SURODAKAN	9	1.540	900
		SEKRETARIS	8	1.320	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	900
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	1.295	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	1.295	900
		31.	KELURAHAN NGANTRU	PENGADMINISTRASI UMUM	5
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8			1.295	900
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900
LURAH NGANTRU	9			1.540	900
SEKRETARIS	8			1.320	900
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5			490	900
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8			1.295	900
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8			1.295	900



32.	<b>KELURAHAN SUMBERGEDONG</b>	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	1.295	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		LURAH SUMBERGEDONG	9	1.540	900
		SEKRETARIS	8	1.320	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	900
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	1.295	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	1.295	900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900
		33.	<b>KELURAHAN KELUTAN</b>	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900
LURAH KELUTAN	9			1.540	900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5			490	900
SEKRETARIS	8			1.320	900
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8			1.295	900
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8			1.295	900
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	900

	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	1.295	900
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	900

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO DARDAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si  
NIP .19650919199602 2 001



B. DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :

BULAN :

TAHUN :

NO	NAMA	NAMA JABATAN	GOL. RUANG	NO. REKENING BANK	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	SATUAN HARGA JABATAN	TPP 100%	KETIDAKHA DIRAN	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	JUMLAH TPP DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8	10	11=9-(10*9)	12	13 = 11 - 12	14

Trenggalek , .....

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA GAJI

(NAMA)  
Pangkat  
NIP. ....

(NAMA)  
Pangkat  
NIP. ....

(NAMA)  
Pangkat  
NIP. ....

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Perhitungan yang terdapat pada lembar verifikasi kehadiran dan daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan Kelas Jabatan dan/atau Jabatan PNSD bulan ..... Tahun ..... pada ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan tingkat kehadiran pegawai dan penilaian kegiatan kedinasan.

Dan kami menyatakan bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran informasi dalam lembar verifikasi kehadiran dan daftar perhitungan TPP berdasarkan Kelas Jabatan dan/atau Jabatan tersebut. Apabila, dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas pengajuan pemberian TPP tersebut, maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Trenggalek dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Trenggalek, .....  
Pegguna Anggaran/ Kuasa  
Pegguna Anggaran

-----

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**

**EMIL ELESTIANTO DARDAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si  
NIP .19650919199602 2 001